

Menavigasi Ekonomi yang Tidak Pasti: Peran Kebijakan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Nilai Rupiah dan Harga

M Rian Alfin H

Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Wiranegara, Pasuruan, Indonesia

Email: alfinhidatay@gmail.com

Informasi Artikel

Submitted : 21-05-2026

Accepted : 10-07-2026

Published : 15-08-2026

Keywords:

Monetary Policy

Price Stability

Rupiah

Bank Indonesia

Economic Uncertainty

Abstract

Global economic uncertainty, commodity price fluctuations, and foreign capital flows have become major challenges in maintaining national economic stability in recent years. This study aims to analyze the strategic role of monetary policy implemented by Bank Indonesia and the Government, as well as to evaluate its effectiveness in maintaining rupiah exchange rate stability and controlling inflation. The research employs a library research method with a qualitative descriptive approach, referring to secondary data including policy reports, regulations, and scientific studies published between 2021–2026. The findings indicate that key instruments such as policy rate adjustments, open market operations, and exchange rate interventions play a significant role in balancing money supply and market expectations. Furthermore, the effectiveness of monetary policy relies heavily on timely responses to external shocks and strong coordination with macroprudential and fiscal policies. This article concludes that monetary policy serves as a key instrument in navigating economic dynamics, with a primary focus on preserving people's purchasing power and ensuring sustainable economic growth.

Abstrak

Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan pergerakan modal asing menjadi tantangan utama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian laju inflasi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, mengacu pada data sekunder berupa laporan kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta kajian ilmiah terkini tahun 2021–2026. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa instrumen utama berupa pengaturan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan intervensi nilai tukar memiliki peran signifikan dalam menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dan ekspektasi pasar. Lebih lanjut, efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada ketepatan respons terhadap guncangan eksternal serta sinergi erat dengan kebijakan makroprudensial dan fiskal. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan moneter merupakan instrumen kunci dalam menavigasi dinamika ekonomi, dengan fokus utama memelihara daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Kebijakan Moneter, Stabilitas Harga, Nilai Rupiah, Bank Indonesia, Ketidakpastian Ekonomi.

1. PENDAHULUAN

Laju dinamika ekonomi dunia yang semakin terintegrasi membawa dampak ganda bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Di satu sisi, keterbukaan ekonomi membuka peluang pertumbuhan melalui investasi dan perdagangan, internasional yang semakin bebas. Arus modal asing yang masuk dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pengembangan usaha, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas nasional. Namun di sisi lain meningkatkan kerentanan terhadap guncangan eksternal. Fenomena seperti ketegangan geopolitik, lonjakan harga energi dan pangan global, serta perubahan arah kebijakan suku bunga bank sentral negara maju dalam lima tahun terakhir telah memberikan tekanan besar terhadap stabilitas harga dan nilai tukar di pasar domestik (Wijaya & Putri, 2026; Wulandari & Nugroho, 2025). Kondisi ini menjadi perhatian utama mengingat stabilitas ekonomi merupakan syarat mutlak bagi keberlanjutan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Ketika ekonomi tidak stabil, rencana

pembangunan menjadi sulit diprediksi dan dilaksanakan, serta risiko kemiskinan dapat meningkat akibat menurunnya daya beli masyarakat. Selama periode 2021–2026, nilai tukar Rupiah berfluktuasi signifikan, bergerak di kisaran Rp14.200 hingga Rp16.800 per USD. Tekanan paling berat terjadi pada 2022–2023 seiring kenaikan suku bunga agresif The Fed, namun kembali menguat dan stabil di kisaran Rp15.000–Rp15.500 pada 2025–2026 seiring membaiknya kondisi global. Dari sisi harga, tingkat inflasi sempat mencapai puncaknya di angka 5,95% pada tahun 2023 akibat lonjakan harga energi dan pangan, sebelum berhasil dikembalikan ke dalam sasaran 2%–4% pada akhir tahun 2024 dan stabil di angka 2,8%–3,2% pada 2025. Menanggapi dinamika tersebut, pergerakan kebijakan moneter juga sangat dinamis, di mana BI 7-Day Reverse Repo Rate disesuaikan dari level terendah 3,5% di awal 2022 naik menjadi 6,00% pada akhir tahun yang sama sebagai garis pertahanan utama, sebelum perlahan diturunkan kembali secara hati-hati pada tahun-tahun berikutnya (Indonesia, 2026).

Tekanan ini secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha sektor riil. Ketidakpastian yang tinggi membuat pelaku ekonomi—baik rumah tangga maupun perusahaan—kesulitan merencanakan pola konsumsi maupun produksinya di masa mendatang. Hal ini mengakibatkan aktivitas ekonomi menjadi lebih hati-hati dan melambat, yang pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Berbagai kajian terdahulu telah banyak membahas mekanisme kerja kebijakan moneter dalam kondisi ekonomi tertutup, namun tantangan yang muncul belakangan ini menuntut pendekatan yang lebih adaptif. Penelitian dari (Akhsan et al., 2025) mengungkapkan adanya hubungan dinamis yang semakin kuat antara pergerakan suku bunga, nilai tukar, dan inflasi di era pasca-pemulihan pandemi. Hasil studi tersebut menegaskan bahwa respons kebijakan moneter harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran guna menahan tekanan eksternal agar tidak mengganggu kestabilan di dalam negeri. Sementara itu, (Sari & Wibowo, 2025) menegaskan bahwa tujuan menjaga kestabilan nilai rupiah tidak hanya terbatas pada pengendalian jumlah uang beredar, tetapi juga mencakup manajemen ekspektasi publik dan respons terhadap arus modal jangka pendek. Pandangan ini mempertegas bahwa kebijakan moneter memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi pasar dan perilaku ekonomi masyarakat sehari-hari.

Meskipun telah banyak literatur yang menguraikan teori kebijakan moneter, masih terdapat kesenjangan pembahasan mengenai bagaimana kombinasi instrumen kebijakan—mulai dari suku bunga hingga kebijakan makroprudensial—diselaraskan secara spesifik untuk menjawab ketidakpastian ekonomi yang kompleks seperti kondisi saat ini. Selain itu, kajian mengenai efektivitas transmisi kebijakan hingga berdampak pada harga barang kebutuhan pokok masih terus diperbarui seiring perubahan struktur keuangan dan perilaku ekonomi masyarakat (N. Setiawan & Susanto, 2023). Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Hidayat & Pratama, 2025) hanya berfokus pada dinamika nilai tukar secara terpisah, sementara penelitian (Rahmawati & Suprpto, 2024) lebih banyak membahas aspek makroprudensial tanpa mengintegrasikannya secara mendalam dengan kondisi ketidakpastian global saat ini. Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital yang pesat juga mengubah cara kerja transmisi kebijakan moneter, sebuah aspek yang masih jarang dibahas secara terintegrasi dalam kajian-kajian terdahulu (A. Widodo & Pratiwi, 2023). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji kebijakan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Berdasarkan dinamika dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis kebijakan moneter pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan harga. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas instrumen yang digunakan serta mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam menavigasi ekonomi yang tidak pasti, serta merumuskan pentingnya sinergi kebijakan dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang diperkaya dengan analisis tren data sekunder. Metode ini dipilih karena sangat relevan untuk menggali konsep, teori, dan praktik kebijakan moneter secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh, terutama untuk memahami kerumitan hubungan antar variabel ekonomi dan konteks pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengintegrasikan berbagai sumber informasi—mulai dari regulasi, laporan resmi, hingga kajian ilmiah—untuk mendapatkan gambaran utuh dan mendalam mengenai topik yang dibahas tanpa harus melakukan pengumpulan data lapangan yang memakan waktu. Secara tahapan, penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah dan pengumpulan materi kepustakaan yang relevan, dilanjutkan dengan pengelompokan materi berdasarkan topik bahasan, analisis mendalam, hingga penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada kurun waktu 2021 hingga 2026 untuk menangkap dinamika ekonomi pasca-pandemi COVID-19 dan respons kebijakan yang diterapkan hingga kondisi terkini.

2.2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dan telaah pustaka mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat agar materi yang diperoleh relevan, akurat, dan berkualitas tinggi. Kriteria inklusi mencakup sumber berupa dokumen resmi Bank Indonesia, Undang-Undang dan peraturan terkait, laporan berkala kebijakan moneter, serta artikel jurnal ilmiah terindeks nasional maupun internasional yang diterbitkan tahun 2021–2026 dan membahas topik kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, inflasi, ekonomi makro Indonesia, dan sistem pembayaran. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi tulisan berupa opini populer di media massa, artikel berita tanpa kajian ilmiah mendalam, makalah seminar yang tidak terpublikasi secara jurnal, atau publikasi di luar rentang waktu dan topik yang ditetapkan. Secara rinci, peneliti mengumpulkan dan meninjau puluhan sumber utama yang memenuhi kriteria tersebut, yang terdiri dari artikel jurnal terakreditasi, laporan resmi otoritas moneter dan fiskal, dokumen peraturan perundang-undangan, dan buku teori ekonomi moneter terkini.

Analisis data dilakukan menggunakan kombinasi metode analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif tren data, guna memperkuat kedalaman analisis sekaligus menjawab tantangan kebaruan informasi. Pertama, analisis isi dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menyistematiskan, dan menginterpretasikan hubungan antar data yang telah dikumpulkan. Langkah analisis dimulai dengan identifikasi konsep dasar kebijakan moneter, penguraian mekanisme kerja instrumen, hingga evaluasi dampak dan tantangan yang ada. Hasilnya disusun menjadi narasi ilmiah berbentuk analisis tematik dan sintesis, di mana peneliti memadukan pandangan berbagai penulis dan dokumen untuk membangun argumen baru yang utuh dan logis. Kedua, analisis tren data digunakan untuk melengkapi narasi kualitatif dengan penyajian dan pembahasan data statistik deskriptif seperti pergerakan suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan indikator keuangan lain. Hal ini bertujuan untuk memperkuat argumen teoritis dengan bukti empiris riil, menunjukkan bagaimana instrumen kebijakan merespons kondisi pasar secara nyata dalam kurun waktu penelitian. Kombinasi metode ini dilakukan agar penelitian kepustakaan ini tidak hanya sekadar mengutip teori, melainkan menghasilkan sintesis pemikiran yang komprehensif, berbasis data, dan memiliki nilai tambah keilmuan yang jelas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar, Tujuan, dan Jenis Kebijakan Moneter

Berdasarkan kerangka hukum dan teori ekonomi, kebijakan moneter didefinisikan sebagai serangkaian tindakan terencana yang diambil oleh otoritas moneter—dalam hal ini Bank Indonesia—untuk mengendalikan kuantitas uang yang beredar, mengatur ketersediaan kredit, dan mempengaruhi tingkat suku bunga guna mencapai tujuan ekonomi makro. Secara yuridis, tujuan utama kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Makna kestabilan nilai rupiah ini terbagi menjadi dua dimensi yang saling berkaitan erat, yaitu stabilitas harga barang dan jasa yang tercermin dalam angka inflasi, serta stabilitas nilai tukar terhadap mata uang negara lain (Sari & Wibowo, 2025). Pemahaman ini menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan kebijakan, di mana Bank Indonesia harus menyeimbangkan kedua aspek tersebut agar tidak saling bertentangan dan saling mendukung.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter dibedakan menjadi dua jenis utama sesuai dengan arah tujuannya. Pertama, kebijakan moneter ekspansif yang ditempuh untuk menambah jumlah uang beredar guna mendorong kegiatan ekonomi saat pertumbuhan melambat atau krisis. Kebijakan ini biasanya diterapkan saat permintaan masyarakat rendah dan perekonomian membutuhkan dorongan likuiditas. Kedua, kebijakan moneter kontraktif yang bertujuan mengurangi likuiditas di masyarakat guna menekan laju inflasi yang terlalu tinggi dan berisiko menggerus daya beli. Penetapan jenis kebijakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didasarkan pada evaluasi mendalam terhadap indikator ekonomi terkini dan proyeksi ke depan (Azky et al., 2024). Landasan teori ini juga diperkuat oleh pandangan (Manurung & Simanjuntak, 2021) yang menjelaskan bahwa kebijakan moneter adalah instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kestabilan harga. Keseimbangan ini menjadi tantangan terbesar bagi otoritas moneter, mengingat kedua tujuan tersebut sering kali memiliki arah kebijakan yang berbeda. Dan memerlukan pertimbangan yang cermat agar tidak meleset dari sasaran

Instrumen Kebijakan Moneter di Era Ketidakpastian

Untuk menerapkan tujuan tersebut, Bank Indonesia menggunakan seperangkat instrumen kebijakan yang terus disempurnakan menyesuaikan perkembangan zaman dan tantangan ekonomi. Berdasarkan kajian (Hidayat & Pratama, 2025) serta (R. Setiawan & Anwar, 2025), instrumen yang paling dominan dan efektif digunakan dalam lima tahun terakhir meliputi pengaturan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, pengaturan Giro Wajib Minimum (GWM), intervensi nilai tukar, serta kebijakan makroprudensial sebagai pelengkap krusial. Kelima instrumen ini bekerja secara sinergis dan saling mendukung untuk mencapai tujuan stabilitas yang ditetapkan.

Pengaturan suku bunga acuan (BI 7-Day Reverse Repo Rate) berfungsi sebagai sinyal utama arah kebijakan. Perubahan suku bunga ini akan ditransmisikan ke seluruh struktur suku bunga di pasar keuangan, sehingga mempengaruhi keputusan tabungan dan investasi masyarakat maupun dunia usaha. (Akhsan et al., 2025) menegaskan bahwa respon suku bunga yang cepat dan tepat merupakan kunci utama dalam menahan tekanan pelemahan nilai tukar dan mengendalikan ekspektasi inflasi, terutama saat pasar bereaksi berlebihan terhadap berita eksternal. Hal ini sejalan dengan penjelasan (Nugroho & Hidayat, 2023) mengenai hubungan erat antara kebijakan suku bunga dengan jumlah uang yang beredar dan tingkat harga barang. Kenaikan suku bunga akan mengurangi keinginan masyarakat untuk berbelanja dan mendorong menabung, sehingga tekanan harga berkurang seiring berkurangnya permintaan.

Selanjutnya, operasi pasar terbuka dan pengaturan Giro Wajib Minimum berfungsi mengelola likuiditas secara mendasar dalam sistem perbankan. Melalui pembelian atau penjualan surat berharga serta penyesuaian persentase dana wajib simpanan, otoritas dapat mengatur seberapa besar kemampuan bank dalam menyalurkan kredit ke sektor riil (R. Setiawan & Anwar, 2025). Di tengah tingginya volatilitas aliran modal asing, instrumen intervensi nilai tukar menjadi sangat krusial untuk mencegah pergerakan nilai tukar yang berlebihan dan tidak wajar yang dapat mengganggu perdagangan luar negeri. (Kurniawan & Wibowo, 2024) menemukan bahwa intervensi yang dilakukan secara transparan dan terukur mampu mengurangi ketidakpastian pasar tanpa mengubah fundamental ekonomi jangka panjang yang sudah terbentuk.

Selain instrumen murni moneter, kebijakan makroprudensial berfungsi sebagai pelengkap yang tak terpisahkan. Instrumen ini berfokus pada pengaturan risiko sistem keuangan dan perilaku penyaluran kredit, memastikan bahwa peredaran uang beredar tetap aman dan terarah, sehingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Rahmawati & Suprpto, 2024). Perkembangan ekonomi digital juga menuntut penyesuaian instrumen ini agar tetap relevan, sebagaimana disoroti oleh (A. Widodo & Pratiwi, 2023) yang menguraikan tantangan baru dalam pengendalian uang beredar dan peredaran nilai di era teknologi dan sistem pembayaran yang semakin canggih dan cepat. Kebijakan makroprudensial memastikan bahwa meskipun teknologi berkembang pesat, risiko kegagalan sistem keuangan tetap dapat dikendalikan dengan baik.

Mekanisme Transmisi dan Dampak Kebijakan

Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada kelancaran mekanisme transmisi, yaitu proses berantai di mana keputusan kebijakan diterapkan hingga berdampak pada ekonomi riil. Alur kerjanya dimulai dari perubahan kebijakan yang mempengaruhi suku bunga dan jumlah uang, kemudian mengubah perilaku lembaga keuangan, selanjutnya mengubah keputusan belanja dan investasi pelaku ekonomi, hingga akhirnya berpengaruh pada tingkat harga dan pertumbuhan ekonomi. (Saputra & Amalia, 2026) serta (N. Setiawan & Susanto, 2023) menjelaskan bahwa di Indonesia, jalur suku bunga dan nilai tukar merupakan jalur transmisi yang paling kuat dampaknya dibandingkan jalur jumlah uang atau kredit.



Gambar 1. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Bank Indonesia

Sumber: (Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, 2025) <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/Default.aspx>

Berdasarkan Gambar 1, terlihat secara rinci bagaimana kebijakan yang diambil Bank Indonesia—mulai dari pengaturan suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, fasilitas berdiri, sterilisasi valas, hingga pengaturan Giro Wajib Minimum—berdampak pada likuiditas pasar uang dan pasar valas. Pergerakan besaran moneter ini kemudian ditransmisikan melalui enam jalur utama yang saling berkaitan: jalur suku bunga, jalur kredit, jalur neraca keuangan, jalur harga aset, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi. Keenam jalur ini bekerja bersamaan mempengaruhi sisi penawaran dan permintaan ekonomi, yang akhirnya menentukan tingkat tekanan inflasi domestik maupun dampak dari faktor eksternal. Indikator-indikator pemantauan di setiap tahapan memastikan kebijakan berjalan sesuai arah yang diharapkan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa transmisi kebijakan tidak berjalan satu arah atau sederhana, melainkan melalui proses yang kompleks dan saling mempengaruhi. Hal ini sejalan dengan kondisi riil Indonesia periode 2021–2026, di mana penyesuaian suku bunga tidak hanya mempengaruhi biaya pinjaman, tetapi sangat kuat terasa dampaknya melalui jalur nilai tukar dan ekspektasi pasar saat menghadapi gejolak ekonomi global. Salah satu ujian terberat efektivitas transmisi terjadi pada periode 2022–2023, saat dunia menghadapi fenomena *Higher for Longer*—di mana bank sentral negara maju terutama *The Fed* menaikkan suku bunga secara agresif dan mempertahankannya di level tinggi dalam waktu lama. Pada kondisi ini, instrumen utama Bank Indonesia yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate terbukti menjadi garis pertahanan utama. Kenaikan suku bunga acuan dari 3,5% menjadi 6,00% dalam kurun waktu kurang dari satu tahun bukan sekadar kenaikan angka, melainkan respons strategis untuk menjaga selisih imbal hasil aset keuangan Indonesia agar tetap menarik, mencegah arus modal keluar secara besar-besaran, dan menahan tekanan depresiasi Rupiah yang saat itu sangat kuat. Di momen ini, jalur nilai tukar dan ekspektasi menjadi jalur transmisi paling dominan dan efektif dibandingkan jalur lain, sejalan dengan pandangan (Saputra & Amalia, 2026; N. Setiawan & Susanto, 2023).

Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan keuangan digital mengubah cara kerja transmisi kebijakan secara mendasar. Aliran uang kini bergerak lebih cepat, lintas batas, dan berbasis teknologi melalui sistem pembayaran elektronik dan layanan keuangan digital. Bank Indonesia meresponsnya dengan tidak hanya mengandalkan instrumen konvensional, tetapi memperkuat kebijakan makroprudensial dan pengaturan sistem pembayaran agar transmisi kebijakan tetap sampai ke sektor riil dan tidak hanya berputar di pasar keuangan semata. Dampak yang dihasilkan bersifat menyeluruh terhadap berbagai aspek ekonomi. Terhadap stabilitas harga, kebijakan yang ketat mampu menekan tekanan inflasi, namun jika terlalu kaku dapat menghambat pertumbuhan. Sebaliknya, kebijakan yang akomodatif mendukung pemulihan ekonomi namun berisiko menaikkan harga jika dilakukan berlebihan. (Al Amin, 2025) menekankan bahwa dampak terhadap daya beli masyarakat sangat nyata, di mana pengendalian inflasi yang baik menjaga kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok. Hal ini didukung oleh hasil penelitian empiris (Yunita & Santoso, 2024) yang menunjukkan dampak signifikan kebijakan moneter terhadap inflasi pada periode 2021–2023.

Terhadap nilai tukar, kebijakan moneter berperan menjaga agar nilai rupiah tidak terlalu tertekan akibat faktor eksternal, yang mana hal ini sangat penting mengingat tingginya ketergantungan Indonesia pada barang modal dan bahan baku impor. (Santoso & Setiawan, 2022) dalam penelitiannya pasca pandemi juga menemukan bahwa kebijakan moneter memiliki peran vital dalam memulihkan kepercayaan pasar terhadap nilai mata uang domestik.

Tantangan dan Strategi di Tengah Ketidakpastian

Penerapan kebijakan moneter saat ini menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dekade sebelumnya. Berdasarkan temuan (Wulandari & Nugroho, 2025) serta (Susanti & Amalia, 2023), tantangan utama bersumber dari faktor eksternal yang dominan, seperti ketidakpastian arah kebijakan negara maju, guncangan harga komoditas global, dan risiko geopolitik

yang dampaknya masuk ke ekonomi domestik dengan sangat cepat. Pergerakan modal asing yang bersifat spekulatif dan masuk atau keluar dalam waktu sangat singkat membuat stabilitas ekonomi menjadi sangat rentan. Di sisi internal, struktur ekonomi yang belum seimbang antara produksi dan konsumsi, serta masih tingginya biaya logistik, membuat transmisi kebijakan kadang berjalan lambat atau tidak merata ke seluruh daerah dan sektor ekonomi. (Siregar & Harahap, 2021) juga mengingatkan bahwa efektivitas pengendalian jumlah uang beredar sering kali terganggu oleh faktor-faktor struktural ekonomi dan ketidaksempurnaan pasar keuangan

Menjawab tantangan tersebut, strategi utama yang ditempuh adalah fleksibilitas dan sinergi kebijakan. Pembahasan kebijakan moneter tidak lengkap jika berdiri sendiri. Pengalaman krisis dan gejolak ekonomi terbaru membuktikan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kerja sama lintas lembaga. Di Indonesia, wadah sinergi ini terwadahi secara kelembagaan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang beranggotakan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Peran sinergi ini sangat nyata terlihat saat menangani dampak guncangan eksternal maupun pemulihan ekonomi. Kebijakan moneter dari Bank Indonesia berfokus pada stabilitas harga dan nilai tukar, diselaraskan dengan kebijakan makroprudensial untuk menjaga ketahanan bank dan sistem keuangan, serta didukung kebijakan fiskal dari Kementerian Keuangan berupa alokasi anggaran, insentif ekonomi, dan stabilisasi harga untuk mendorong pertumbuhan dan produktivitas sektor riil (M. Firmansyah & Susanti, 2026; M. Widodo & Santoso, 2022; Wijaya & Putri, 2026) menyimpulkan bahwa sinergi ketiga pilar kebijakan ini merupakan kunci utama agar kebijakan moneter tetap efektif menavigasi ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Contoh nyata sinergi ini terjadi saat penanganan inflasi yang didorong kenaikan harga pangan dan energi global pada 2022–2023. Di sini, Bank Indonesia mengendalikan sisi permintaan agar tidak menambah tekanan harga, sementara Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan kementerian terkait mengelola sisi penawaran, distribusi, dan kelancaran rantai pasok barang kebutuhan pokok. Tanpa sinergi ini, kebijakan moneter akan berjalan berat dan hasilnya tidak akan maksimal karena tekanan harga bersumber dari sisi produksi, bukan hanya dari jumlah uang yang beredar.

Selain itu, komunikasi kebijakan yang transparan juga menjadi strategi penting untuk mengarahkan ekspektasi masyarakat dan pasar keuangan. (D. Firmansyah & Saputra, 2023) mengemukakan bahwa peran komunikasi sangat krusial dalam membangun kepercayaan, sehingga respons pasar terhadap kebijakan dapat berjalan sesuai harapan. (Anwar & Wulandari, 2022) juga menambahkan bahwa di tengah tekanan inflasi global, kredibilitas bank sentral adalah aset terpenting dalam menjaga stabilitas harga.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mendalam mengenai peran, instrumen, mekanisme transmisi, hingga tantangan dan strategi kebijakan moneter di Indonesia periode 2021–2026, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter memegang peran sentral dan strategis sebagai penyangga utama stabilitas ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi, mandat Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai rupiah—yang mencakup stabilitas harga barang dan stabilitas nilai tukar—telah terbukti menjadi fondasi utama keberlanjutan ekonomi dan perlindungan daya beli masyarakat. Instrumen seperti penyesuaian suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, dan intervensi nilai tukar berfungsi efektif sebagai peredam kejutan terhadap guncangan eksternal. Mekanisme transmisi kebijakan bekerja menyeluruh melalui enam saluran utama yang saling terhubung, di mana pada periode tekanan tinggi seperti tahun 2022–2023, jalur nilai tukar dan ekspektasi pasar menjadi saluran paling krusial dan efektif.

Selanjutnya, efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada sinergi kelembagaan dan kekuatan fundamental ekonomi domestik. Kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi kuat dengan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas keuangan dan kebijakan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan menjadi sangat vital dalam memastikan keselarasan arah kebijakan antar lembaga dan efektivitas penanganan risiko sistemik. Di sisi lain, tantangan ke depan masih akan berat, terutama karena faktor eksternal yang sulit diprediksi dan ketidakseimbangan struktur ekonomi internal. Oleh karena itu, strategi kebijakan moneter ke depan harus tetap fleksibel, responsif, transparan dalam komunikasi, serta terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik agar tidak terlalu rentan terhadap gejolak luar negeri.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji efektivitas instrumen kebijakan secara kuantitatif menggunakan model ekonometrika atau berfokus pada analisis dampak kebijakan moneter terhadap sektor-sektor ekonomi spesifik, guna melengkapi hasil sintesis kualitatif yang telah disajikan. Selain itu, kajian mendalam mengenai dampak transformasi digital terhadap efektivitas kebijakan moneter sangat diperlukan seiring pesatnya perkembangan teknologi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan, I. M., Maharani, A. S., & Baity, I. N. (2025). Monetary Policy Analysis in Indonesia: The Dynamic relationship Between the BI Rate, Inflation, and the Rupiah Exchange Rate. *International Conference on Social Science and Education*. <https://doi.org/10.34123/icdsos.v2025i1.689>
- Al Amin, E. M. N. (2025). Kebijakan Moneter dan Daya Beli Masyarakat: Dampak Langsung pada Harga Kebutuhan Pokok. *Anggaran: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Akuntansi*. <https://journal.area1.or.id/index.php/anggaran/article/view/1385>
- Anwar, M., & Wulandari, S. (2022). Peran Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Harga di Tengah Tekanan Inflasi Global. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 14(1), 23–34. <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/jke/article/view/4872>
- Azky, S., Anita, R., & Oktaviani, N. R. (2024). Peranan Kebijakan Moneter dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam Dan Keuangan*, 5(1), 45–58. <https://doi.org/10.55606/jeik.v5i1.219>
- Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024*. Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI 2024 \[versi lengkap\].pdf](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI%2024%20%5Bversi%20lengkap%5D.pdf)
- Firmansyah, D., & Saputra, M. (2023). Peran Komunikasi Kebijakan Moneter dalam Menjaga Ekspektasi Pasar dan Stabilitas Harga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 7(2), 112–124. <https://doi.org/10.32528/jies.v7i2.114>
- Firmansyah, M., & Susanti, H. (2026). Sinergi Kebijakan Moneter, Makroprudensial, dan Fiskal dalam Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v30i2.8241>
- Hidayat, A., & Pratama, R. (2025). Menata Ulang Strategi Stabilitas Rupiah: Pendekatan Tiga Pilar Kebijakan Moneter. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.24912/jeb.v28i1.967>
- Indonesia, B. (2026). *Laporan Kebijakan Moneter: Tinjauan dan Proyeksi Ekonomi 2021–2026*. Bank Indonesia.

- Kurniawan, A., & Wibowo, S. (2024). Peran Intervensi Bank Indonesia dalam Menstabilkan Nilai Tukar Rupiah. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 16(1), 45–59. <https://doi.org/10.17977/um002.v16i1.7852>
- Manurung, T., & Simanjuntak, H. (2021). Teori dan Penerapan Kebijakan Moneter di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 15(1), 34–48. <https://doi.org/10.22437/je.v15i1.2984>
- Nugroho, S., & Hidayat, R. (2023). Analisis Hubungan Kebijakan Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Harga Barang. *Jurnal Ekonomi Makro*, 8(2), 67–81. <https://doi.org/10.24127/jem.v8i2.541>
- Rahmawati, Y., & Suprpto, H. (2024). Efektivitas Kebijakan Makroprudensial Sebagai Pelengkap Kebijakan Moneter. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 201–215. <https://doi.org/10.35878/jkps.v8i2.645>
- Santoso, B., & Setiawan, R. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Moneter Pasca Pandemi terhadap Stabilitas Nilai Tukar. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(2), 112–126. <https://doi.org/10.24912/jeb.v25i2.894>
- Saputra, D., & Amalia, R. (2026). Transmisi Kebijakan Moneter: Mekanisme dan Efektivitas Mengendalikan Inflasi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.31294/jek.v10i1.1892>
- Sari, D. P., & Wibowo, A. (2025). Analisis Peran Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Nilai Tukar Rupiah. *Musytari, Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keuangan*. <https://ejournal.cibinstitute.com/index.php/musytari/article/view/2039>
- Setiawan, N., & Susanto, B. (2023). Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi dan Menjaga Nilai Rupiah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(1), 89–104. <https://doi.org/10.18502/jep.v21i1.12847>
- Setiawan, R., & Anwar, M. (2025). Peran Operasi Pasar Terbuka dan Giro Wajib Minimum dalam Pengendalian Likuiditas. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Ekonomi*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/jime/article/view/7412>
- Siregar, H., & Harahap, A. (2021). Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Jumlah Uang Beredar dan Inflasi. *Jurnal Ekonomi Terapan*, 6(2), 112–128. <https://doi.org/10.20473/jet.v6i2.3451>
- Susanti, H., & Amalia, R. (2023). Kebijakan Moneter Menghadapi Guncangan Harga Komoditas Global. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Internasional*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.15294/jeki.v12i1.387>
- Widodo, A., & Pratiwi, L. (2023). Kebijakan Moneter di Era Ekonomi Digital: Tantangan dan Penyesuaian Instrumen. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 27(4), 345–360. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v27i4.7623>
- Widodo, M., & Santoso, I. (2022). Sinergi Kebijakan Moneter dan Makroprudensial dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 26(3), 189–204. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i3.7129>
- Wijaya, A., & Putri, L. (2026). Strategi Kebijakan Moneter Bank Indonesia Menghadapi Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi Makro Dan Moneter*. <https://doi.org/10.22437/jem.v12i1.41256>

- Wulandari, S., & Nugroho, B. (2025). Pengaruh Ketidakpastian Ekonomi Global terhadap Efektivitas Kebijakan Moneter Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
<https://doi.org/10.18502/jep.v23i1.15679>
- Yunita, R., & Santoso, B. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2021–2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 9(1), 78–94.
<https://doi.org/10.20473/jiet.v9i1.4211>